



LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

2017




Kata Pengantar

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2017 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2017, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bantul, 19 Februari 2018

Kepala Dinas,

Ir. Subiyanta Hadi, MM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 195904011985031013



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Nomor 38 Tahun 2017.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah dan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan

dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 115,76%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I. PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
1.3 Isu Strategis	13
1.4 Sistematika Laporan	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	22
2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	33
3.3 Akuntabilitas Anggaran	54
3.4 Efisiensi Sumber Daya	56
3.5 Kinerja Lain-lain	57
BAB IV. PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan Tahun 2017	11
Tabel 1.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis	13
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2017-2021	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Misi dan Tujuan	18
Tabel 2.3	Strategi dan Kebijakan	19
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	20
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2017-2021	21
Tabel 2.6	Target Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2017-2021	22
Tabel 2.7	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Periode 2017-2021	25
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2017	25
Tabel 2.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017	26
Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKJ Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017	28
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun Anggaran 2017	30
Tabel 3.4	Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2017	31
Tabel 3.5	Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Dinas Perdagangan Tahun 2017	32

Tabel 3.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	35
Tabel 3.7	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan seeda motor	36
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Indikator Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	37
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	38
Tabel 3.10	Tingkat Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2017	41
Tabel 3.11	Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2017	41
Tabel 3.12	Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2012-2017	41
Tabel 3.13	Jumlah dan Jenis Pasar di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017	45
Tabel 3.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	46
Tabel 3.15	Pengukuran Kinerja Program Pemberdayaan Pedagang	48
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	49
Tabel 3.17	Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2017 Di Kabupaten Bantul	50
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Ekspor Tahun 2012-2017	52
Tabel 3.19	Pengukuran Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	53
Tabel 3.20	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016	54
Tabel 3.21	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	55
Tabel 3.22	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	56
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2017	58
Tabel 3.24	Nilai rata-rata unsur pelayanan	59
Tabel 3.25	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	60
Tabel 3.26	Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas Perdagangan Tahun 2017	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	11
Gambar 1.2	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan	12
Gambar 1.3	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar 1.4	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan	12
Gambar 1.5	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia	12
Gambar 3.1	Planning Process	27
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	33
Gambar 3.3	<i>Struktur Ekonomi Bantul</i>	34
Gambar 3.4	PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35
Gambar 3.5	Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	36
Gambar 3.6	Pengendalian BBM	38
Gambar 3.7	Kepala Dinas Kabupaten Bantul menerima sertifikat pasar ber-SNI	47
Gambar 3.8	Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Tahun 2013-2017	49
Gambar 3.9	Perkembangan Ekspor 2014-2017	52
Gambar 3.10	Target dan Realisasi PAD Tahun 2017	58
Gambar 3.11	Dokumentasi Berbagai Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2017	61



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang



Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 14 program 54 kegiatan pada tahun 2016 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi



Perdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Perdagangan Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK

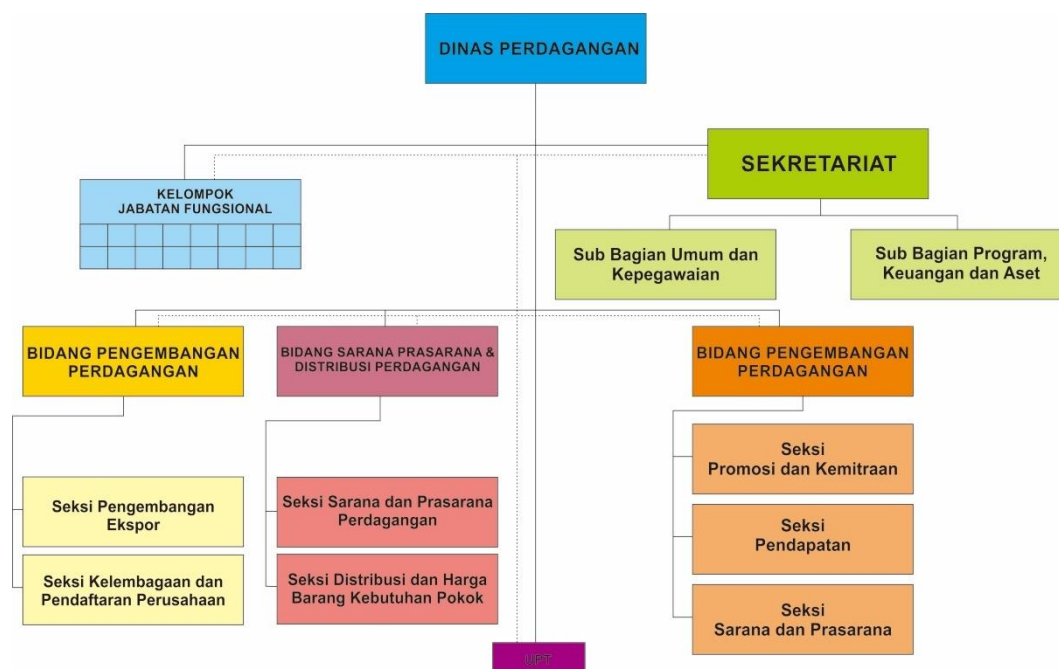
Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

FUNGSI

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang perdagangan.

STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
3. Bidang Pengembangan Perdagangan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 3.1 Kepala Seksi Pengembangan Ekspor
 - 3.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan
4. Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 4.1 Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan
 - 4.2 Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok
5. Bidang Pengembangan Pasar, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 5.1 Seksi Promosi dan Kemitraan;
 - 5.2 Seksi Pendapatan
 - 5.3 Seksi Sarana dan Prasarana
6. UPT



Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan, 2017, diolah

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

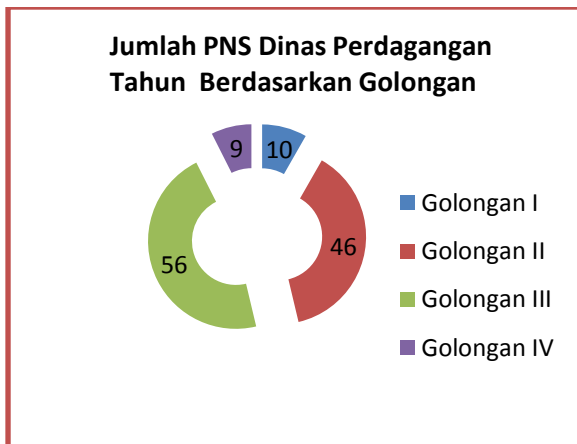
Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan perdagangan Kabupaten Bantul yang berstatus PNS sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebanyak 121 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---|---|----------|
| a. | Kepala Dinas | : | 1 orang |
| b. | Sekretariat | : | 15 orang |
| c. | Bidang Pengembangan Perdagangan | : | 7 orang |
| d. | Bidang Sarpras dan Distribusi Perdagangan | : | 9 orang |
| e. | Bidang Pengembangan Pasar | : | 81 orang |
| f. | UPT Metrologi | : | 9 orang |

Tabel 1.1 SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan Tahun 2017

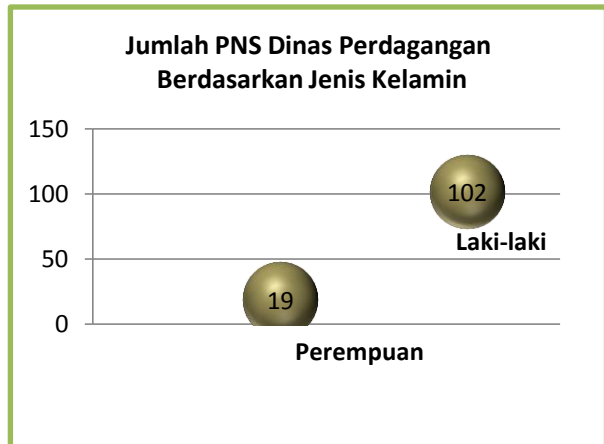
SD	SMP	JENIS PENDIDIKAN					JML	I	GOLONGAN				JML
		SMA	D1/D3	S1	S2	S3			II	III	IV		
4	7	82	1	17	10	0	121	10	46	56	9	121	

Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2017



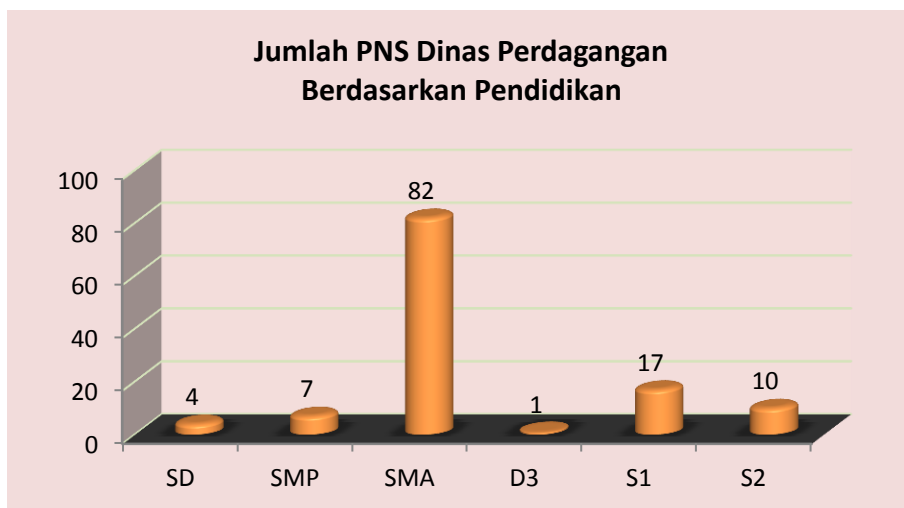
Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2017

Gambar 1.2 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan



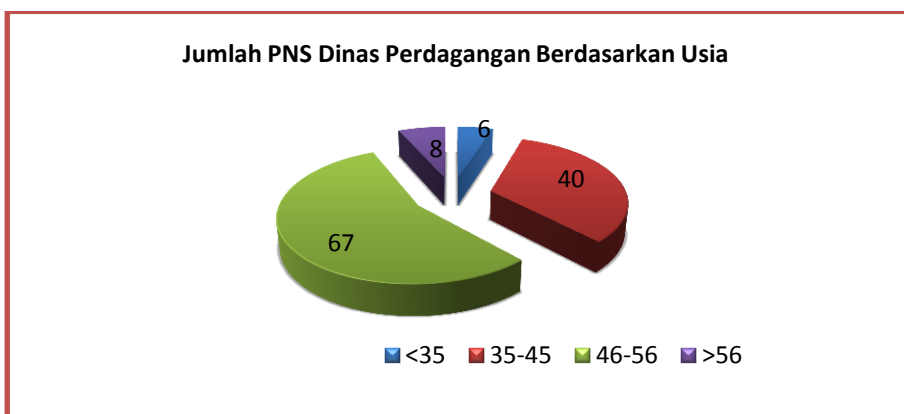
Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2017

Gambar 1.3 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2017

Gambar 1.4 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2017

Gambar 1.5 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia

1.3. Isu Strategis



Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Hasil identifikasi isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2. Identifikasi Isu-Isu Strategis.

DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL
<ul style="list-style-type: none"> - Laju impor dan produk dari luar daerah - Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif - Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa - Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan - Kualitas Data - Kompetensi SDM - Kemudahan pelayanan perizinan usaha - Terbatasnya daya saing produk UMKM - Maraknya rentenir - Kondisi pasar yang terkesan kumuh - Belum tertibnya usaha PKL - Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD - Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat

Sumber : Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2017-2021

1.4. Sistematika Laporan



Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan serta sistematika penyajian;

- Bab II : Perencanaan Kinerja
Memuat Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017, dan Program untuk pencapaian sasaran;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja utama tahun 2017, evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;
- Bab IV : Penutup
Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah pada Misi 3 dalam RPJMD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2017-2021

Visi Kabupaten: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”									
Visi Dinas: “Terwujudnya Tata Kelola Perdagangan yang Adil dan Berdaya Saing”									
NO.	MISI KABUPATEN	MISI DINAS	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN KABUPATEN	INDIKATOR SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DINAS
	MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah pasar tipe A
		Meningkatkan kualitas produk perdagangan		Terwujudnya kualitas produk perdagangan		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan			Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan
						Meningkatnya pertumbuhan ekspor			Pertumbuhan Nilai Ekspor

Sumber: RPJMD Bantul dan Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2017-2021, diolah

2.1.1 Visi dan Misi



Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan visi. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Visi dan misi Rencana Startegis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2017-2021 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, selaras dengan arah, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2012-2017, serta selaras juga dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2015-2019.

Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

serta tatacara penentuan visi maka dalam rangka menentukan cita-cita dan citra yang ingin dicapai dalam jangka menengah Dinas Perdagangan menetapkan visi tahun 2017-2021:

VISI Dinas Perdagangan Tahun 2017 – 2021 :

“Terwujudnya Tata Kelola Perdagangan yang Adil dan Berdaya Saing”

Misi pembangunan Kabupaten Bantul yang sesuai dengan urusan perdagangan adalah misi ketiga yakni “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

Adapun misi yang diemban oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan perdagangan

Penjelasan:

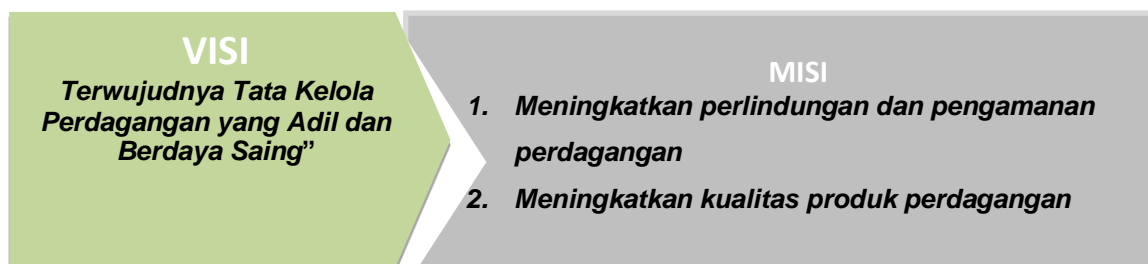
Dinas Perdagangan mampu memberikan kepastian terhadap ketersediaan bahan pokok strategis dan stabilitas harga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen

yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen.

2. Meningkatkan kualitas produk perdagangan

Penjelasan:

Produktivitas UMKM dan pedagang pasar yang semakin meningkat akan mendorong usaha menjadi berkelanjutan dan semakin berkembang di masa depan. Peningkatan produktivitas tersebut membutuhkan dukungan beberapa aspek yaitu SDM, pemasaran, dan perbaikan manajemen usaha. Selain itu sektor perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri merupakan sektor pendukung PDRB yang cukup signifikan. Untuk itu pengembangan sektor ini harus terus didorong agar pertumbuhan PDRB yang pada akhirnya merupakan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.



2.1.2 Tujuan dan Sasaran



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2016-2021 yang dijabarkan melalui misi Dinas Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2017–2021 yaitu:

1. Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
2. Terwujudnya kualitas produk perdagangan

Tabel 2.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1	Meningkatkan perlindungan dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
2	Meningkatkan kualitas produk perdagangan	Terwujudnya kualitas produk perdagangan

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2017-2021, diolah

Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2017–2021 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pasar rakyat
2. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor

2.1.3 Kebijakan, Strategi, dan Program



Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Pengembangan ekspor	1. Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promo si perdagangan, pengembang produk dan pemasaran produk
2. Peningkatan sarpras perdagangan	2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat
3. Peningkatan daya saing sdm	3. Pengembangan aspek SDM
4. Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga	4. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
5. Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima(pk1)	5. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
6. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	6. Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTP dan pengamanan perdagangan
7. Peningkatan akses permodalan dan akses pasar	7. Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2017-2021, diolah

Pada tabel 2.4 disajikan strategi dan kebijakan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI: "Terwujudnya Tata Kelola Perdagangan yang Adil dan Berdaya Saing"			
MISI:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan perdagangan 2. Meningkatkan kualitas produk perdagangan 			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Peningkatan sarpras perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat
		Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima (pkL)	Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
		Peningkatan akses permodalan dan akses pasar	Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga	Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
		Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan
Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pengembangan ekspor	Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembangan produk dan pemasaran produk
		Peningkatan daya saing sdm	Pengembangan aspek SDM

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2017-2021, diolah

Program Dinas Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Program pengembangan sektor perdagangan yang sudah ditentukan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Daftar program operasional Dinas Perdagangan seperti berikut ini:

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
4. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
5. Program Pemberdayaan Pedagang
6. Program Penataan Pasar Rakyat

2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)



Tujuan urusan perdagangan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU).

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2017-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	$(\text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun } n - \text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun } n-1) / \text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun } n-1 \times 100\%$
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	$(\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } n-1) / \text{Nilai ekspor tahun } n-1 \times 100\%$

Tabel 2.6 Target Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2017-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	%	4.61	4.76	5.33	5.62	5.95
		Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	1	2	3	4
2	Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7.1	7.15	7.2	7.25

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

2.2 Perjanjian Kinerja



Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja ini juga tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2017 disahkan. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2017 antara Bupati dan Kepala Dinas, antara Kepala Dinas dan Eselon III, serta antara Eselon III dan Eselon IV.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan PK Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja Tahun 2017, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. Subiyanta Hadi,MM
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. Suharsono
Jabatan : Bupati Bantul

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Drs. H. Suharsono



Ir. Subiyanta Hadi, MM
NIP.19590401 198303 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERDAGANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terciptanya perdagangan daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekspor	7%
2	Meningkatnya Sarpras pasar dan pengelolaan pasar yang baik	Prosentase pasar baik	4,2%
3	Neningtkkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	Peningkatan perosentase pelayanan tera dan tera ulang	4%
4	Peningkatan tata kelola Organisasi serta kinerja dan pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2,154,520,000	
2	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	3,987,450,000	
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1,484,463,000	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10,764,000	
5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2,091,445,000	
6	Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	192,410,000	
7	Program Pemberdayaan Pedagang	535,947,500	
8	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	71,400,000	
9	Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	8,606,475,000	



Tabel 2.7 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Periode 2017-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	4.61
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	4.61	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2,154,520,000
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2,091,445,000
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	192,410,000
					Program Pemberdayaan Pedagang	535,947,500
					Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	8,606,475,000
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1,484,463,000
					Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	71,400,000

Sumber : esakip.bantulkab.go.id



2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No.	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2,154,520,000
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2,002,000,000
		JUMLAH	4.156.520.000
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	192,410,000
		Program Pemberdayaan Pedagang	890,597,500
		Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	8,496,275,000
		JUMLAH	9.579.282.500
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1,461,363,000
		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	71,400,000
		JUMLAH	1.532.763.000

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Gambar 3.1 Planning Process



Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada

tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 3.1

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan					
1.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Kuantitatif	$\frac{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - \text{ tahun } (n - 1)}{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$	data PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Bantul, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS; pemantauan lapangan; entri data ke e-sakip per bulan, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran per triwulan
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya kualitas pasar rakyat					
5.	Jumlah pasar tipe A	Kuantitatif	Jumlah pasar dengan tipe A	Perhitungan/penilaian jumlah pasar tipe A yang kriterianya sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Pasar	Recheck data dan perhitungan; kunjungan ke lapangan; entri data ke e-sakip per bulan; melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran per triwulan
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekspor					
6.	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Kuantitatif	$\frac{\text{nilai ekspor tahun } n - \text{ nilai ekspor tahun } (n - 1)}{\text{nilai ekspor tahun } n - 1} \times 100\%$	Data bersumber dari jumlah SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY kemudian diolah oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul. SKA adalah surat keterangan kebangsaan suatu barang yang disertakan pada saat barang tersebut memasuki wilayah negara tujuan ekspor tertentu untuk memberitahukan bahwa barang tersebut berasal/diolah dari suatu negara	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke DIY; entri data ke e-sakip per bulan, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran per triwulan

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2017, data diolah

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

3.1 Capaian Kinerja



Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :






$$\text{Capaian indikator kinerja} = \text{Realisasi/Rencana} \times 100\%$$

Pencapaian IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja
DINAS PERDAGANGAN Tahun Anggaran 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,61	6,73	145,99
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	1	100.00
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7,09	101.29

Keterangan Warna

Warna	Prosentase	Keterangan
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **115,76%**.



Tabel 3.4 Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	4.61	Triwulan 1	0	0	0	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). PDRB dalam data ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. IKU ini menggunakan PDRB menurut lapangan usaha yakni PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Karena merupakan angka pertumbuhan, maka angka ini dihitung pada akhir tahun. PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2017 sebesar Rp 1.401.507,7 juta rupiah dan tahun 2016 sebesar Rp 1.315.611,24 juta rupiah, sehingga didapat angka pertumbuhan sebesar 6.73%
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	4.61	6.73	145.99	
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	Triwulan 1	0	0	0	Pasar Imogiri Kabupaten Bantul berhasil mendapatkan sertifikat berupa pasar ber SNI 8152:2015 dari Badan Standarisasi Nasional. Pasar ber SNI ini tarafnya sudah diatas pasar tipe A. Di Indonesia baru ada 10 pasar yang tersertifikasi SNI
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	1	1	100	
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	Triwulan 1	0	0	0	Nilai ekspor pada tahun 2017 sebesar 79.200.365,60 US\$ sedangkan pada tahun 2016 sebesar 73.971.386,12 US\$ sehingga pertumbuhannya sebesar 7,09%. Karena merupakan data pertumbuhan, maka bisa dihitung pada akhir tahun. Komoditas dengan nilai tertinggi adalah tekstil, garment, furniture, dan handicraft. Negara tujuan ekspor antara lain Australia, USA, UK, Japan, Canada, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	7	7.09	101.29	

Tabel 3.5 Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Dinas Perdagangan Tahun 2017

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian/Kondisi 2016	2017			Target Akhir RPJMD 2021	Capaian 2017 terhadap 2021 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan						
1.1	<i>Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan</i>						
1.1.1	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		4.61	6.73	145.99	6.95	96.83
	Faktor Penghambat : Tergantung dari data BPS						
	Faktor Pendorong : Karena menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS, maka data yang digunakan lebih valid karena memakai kaidah statistik						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Meningkatkan pelayanan dan pengamanan perdagangan; meningkatkan kualitas SDM pedagang; meningkatkan sarpras perdagangan						
1.2	<i>Meningkatnya kualitas pasar rakyat</i>						
1.2.1	Jumlah pasar tipe A		1	1	100.00	4.00	25.00
	Faktor Penghambat : Untuk mencapai pasar tipe A, banyak persyaratan yang harus terpenuhi						
	Faktor Pendorong : Syarat untuk mencapai pasar tipe A sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013 sehingga penentuan indikator memiliki dasar hukum						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Menyiapkan 1 unit pasar yang lain dengan rehabilitasi dan melengkapi sarana prasarana yang diwajibkan untuk pasar tipe A						
2	Terwujudnya kualitas produk perdagangan						
2.1	<i>Meningkatnya pertumbuhan ekspor</i>						
2.1.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	7.04	7	7.09	101.29	7.25	97.79
	Faktor Penghambat : data ekspor yang tergantung dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY						
	Faktor Pendorong : Data ekspor yang didapat dari Perindag DIY di <i>crosscheck</i> ke masing-masing eksportir yang ada di Kabupaten Bantul						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Meningkatkan nilai ekspor; meningkatkan promosi produk-produk unggulan; pengumpulan data ekspor yang lebih berkualitas						

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

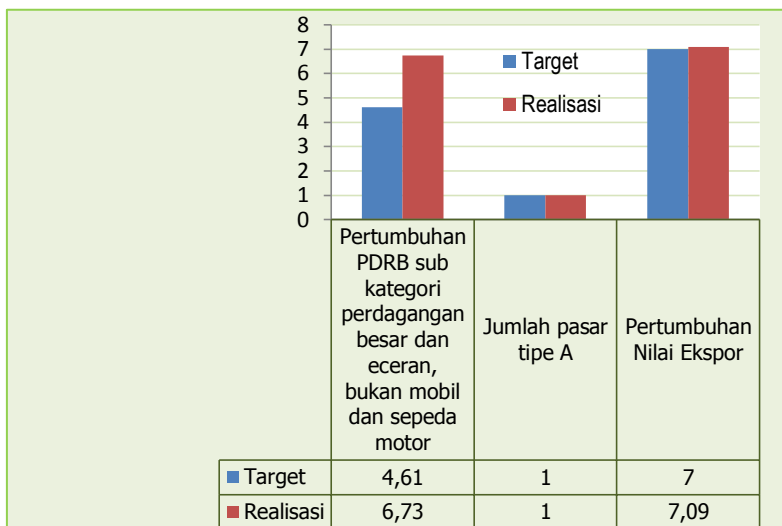


Sasaran 1.
meningkatnya pertumbuhan
PDRB
sektor perdagangan

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan

dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2017;
2. Nilai realisasi tahun 2017 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2017 dengan realisasi pada tahun 2016;
4. Nilai realisasi tahun 2017 dengan realisasi 5 tahun terakhir;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja dengan OPD sejenis ;
6. Faktor penghambat dan faktor pendukung.



Sumber: esakip.bantulkab.go.id, diolah

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran.

Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut penjelasan hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 per sasaran.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

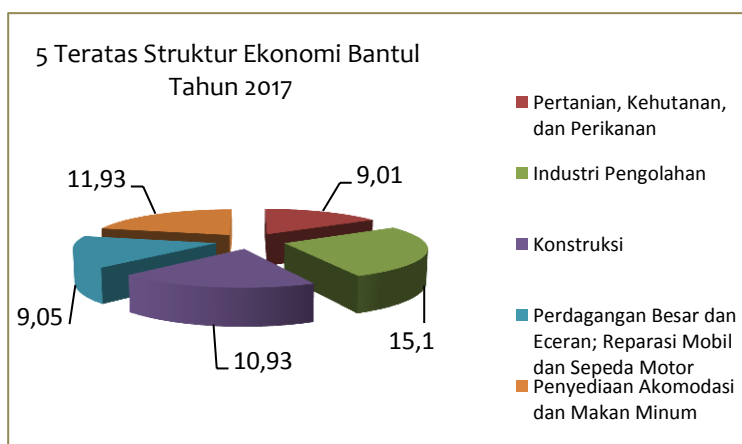
Salah satu cara untuk penghitungan PDRB adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB Bantul menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Perdagangan merupakan salah satu sektor kategori PDRB dari 17 lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Karena dalam hal indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah pertumbuhan PDRB, maka data yang dipakai adalah PDRB atas harga konstan tahun 2010, dengan demikian pertumbuhan sudah bebas dari faktor inflasi.

Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang “*commodity flow approach*”. Marjin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio marjin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau marjin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan (BPS, 2017).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.



Gambar 3.3 Struktur Ekonomi Bantul

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori yang cukup potensial berkembang di wilayah Bantul. Pada tahun 2017 kategori ini menyumbang PDRB Bantul sebesar 9,05 persen terbesar ke 4 setelah kategori Konstruksi.

Pada gambar dapat dilihat bahwa ada 5 kategori struktur ekonomi Bantul teratas,

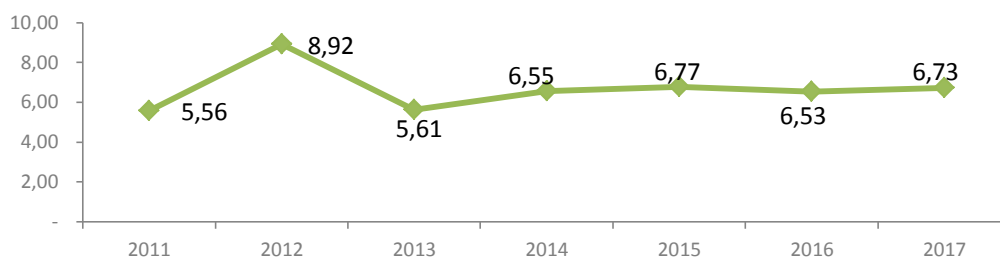
dimana andil tertinggi dicapai oleh Kategori industri pengolahan (15,10%), kemudian diikuti oleh kategori penyediaan akomodasi makan minum (11,93%), kategori konstruksi (10,93%), dan perdagangan di peringkat keempat teratas dengan andil sebesar 9,05%, serta kategori pertanian,kehutanan dan perikanan (9,01%).

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

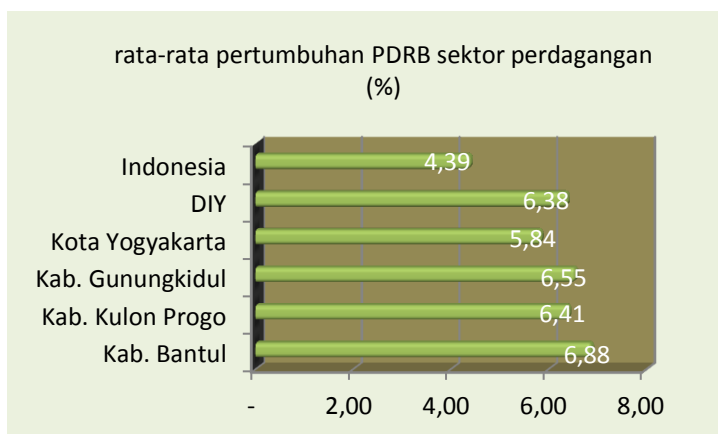
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	6,53	4,61	6,73	145,99	6,95	96,83

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah sebesar 4,61%, realisasi sebesar 6,73%, tercapai 145,99% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 6,53% maka capaian tahun 2017 naik sebesar 0,2%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 6,95%, dengan demikian capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 96,83% dari target akhir Renstra tahun 2021.



Gambar 3.4 PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2011-2017, diolah



Gambar 3.5 Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Perekonomian Bantul di sektor perdagangan mengalami rata-rata pertumbuhan pertahun sekitar 6,67 persen secara riil selama periode 2011-2017. Meskipun tidak seoptimis tahun 2012 yang mencapai 8,92 persen

(Gambar 3.4). Namun demikian sub sektor perdagangan di Bantul menunjukkan kondisi yang semakin membaik dimana pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang positif dan stabil. Hal ini seiring dengan membaiknya perekonomian global, peningkatan produksi, serta meningkatnya daya beli masyarakat.

Berikut ditampilkan data pertumbuhan PDRB sektor perdagangan kabupaten lain, DIY, dan Indonesia. Namun karena data tahun 2017 belum tersedia, sehingga yang ditampilkan adalah angka rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dari tahun 2012 -2016 (5 tahun terakhir).

Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	Rata2/thn
Kab. Bantul	8,92	5,61	6,55	6,77	6,53	6,88
Kab. Kulon Progo	8,77	5,33	5,22	6,52	6,20	6,41
Kab. Gunungkidul	7,01	5,11	6,77	6,89	6,96	6,55
Kota Yogyakarta	6,32	6,11	5,23	5,99	5,54	5,84
DIY	8,66	5,26	5,69	6,19	6,09	6,38
Indonesia	5,40	4,81	5,18	2,54	4,03	4,39

Sumber: *bps.go.id*, 2017, diolah

Dari gambar dan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor) selama tahun 2012-2016, Kabupaten Bantul berada pada urutan pertama dengan angka rata-rata sebesar 6,88 persen, diikuti dengan Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, DIY, kota Yogyakarta, dan di Indonesia dengan nilai rata-rata secara berurutan 6,55; 6,41; 6,38; 5,84; dan terakhir 4,39.

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini juga didukung dari program yang dilaksanakan pada tahun 2017 yakni:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Indikator Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	%	6.5	10.56	162.46

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Indikator program ini adalah cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang. Selama tahun 2017, cakupan alat UTTP yang telah ditera/tera ulang terealisasi sebesar 10,56 persen dari target sebesar 6,5 persen, sehingga prosentase capaian indikator program ini tercapai 162,46 persen. Data ini setara dengan bahwa alat UTTP yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang pada tahun 2017 adalah sebanyak 22.842 unit dari target sebanyak 14.065 unit.

Potensi UTTP yang ada di Kabupaten Bantul secara keseluruhan adalah sebanyak 216.381 unit. Karena pelayanan tera/tera ulang ini merupakan tahun pertama dilaksanakan di kabupaten Bantul (limpahan wewenang dari propinsi), maka target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi.

Program Perlindungan Konsumen dan dan Pengamanan Perdagangan ini dilaksanakan dalam upaya untuk melindungi konsumen dan ketersediaan kebutuhan pokok barang strategis pada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.154.520.000,- terealisasi Rp1.698.685.640,- (78,84). Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Pelayanan Kemetrollogian Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal



Gambar 3.6 Pengendalian BBM

memberikan mandat kepada pemerintah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen

diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pembentukan UPT Metrologi, dan kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka UPT Metrologi berada dibawah kendali Dinas Perdagangan. Tujuan dari pelayanan kemetrollogian ini adalah untuk melindungi produsen, pedagang dan konsumen dalam bidang pengukuran; menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

b. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase deviasi harga komoditas strategis (deviasi yang ditargetkan <5%)	%	5	3.96	120.8

Capaian indikator program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah persentase deviasi harga komoditas strategis (deviasi harga yang ditargetkan adalah dibawah 5 persen). Data deviasi harga adalah data inflasi Kabupaten Bantul yang bersumber dari BPS Kabupaten Bantul. Pada tahun 2017 angka deviasi harga komoditas

strategis adalah sebesar 3,96 persen, yang artinya perbedaan harga komoditas tahun 2017 naik sebesar 3,96 persen dibanding harga pada tahun 2016. Deviasi harga ini dibawah 10 persen sehingga masuk dalam kategori inflasi ringan (normal).

Apabila inflasi itu ringan → mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Apabila inflasi yang parah, saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi) → keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.

Pendorong Inflasi 2017:

- Penyesuaian Tarif Dasar Listrik
- Kenaikan tinggi beberapa jenis bahan makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, sayur-sayuran.
- Bulan Puasa dan Hari Raya → berpengaruh pada inflasi bulan tersebut
- Kenaikan harga BBM
- Kelangkaan bahan bakar rumah tangga

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Berdasarkan keparahannya inflasi dapat dibedakan :

- **Inflasi ringan** (kurang dari 10% / tahun)
- **Inflasi sedang** (antara 10% sampai 30% / tahun)
- **Inflasi berat** (antara 30% sampai 100% / tahun)
- **Hiperinflasi** (lebih dari 100% / tahun)

Indikator untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diartikan sebagai ukuran perubahan harga yang diperoleh dengan membandingkan dari waktu ke waktu biaya yang dikeluarkan untuk paket yang tetap dari komoditas yang ditentukan oleh pembelian konsumen di perkotaan.

Pengumpulan data harga konsumen diperoleh dari hasil wawancara langsung ke pedagang. Wawancara tersebut dilakukan oleh baik pihak BPS maupun dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Seluruh jenis barang dan jasa dikelompokkan ke dalam beberapa daftar isian sesuai dari gejolak harga. Data harga yang dicatat merupakan harga transaksi (bukan penawaran pedagang). Pengumpulan data harga konsumen dilaksanakan di pasar tradisional/rakyat dan pasar modern.

Metode Pendataan 1

Jenis Daftar Isian	Jenis Komoditas	Frekwensi Pencacahan	Hari Pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)
HK-1.1	Beras, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur, susu bubuk, susu bayi, susu balita, susu kental manis, tahu, tempe, bawang ,cabe, minyak goreng, gula pasir,semen, dan emas perhiasan	Mingguan	Senin dan Selasa
HK-1.2	Mi instan, sosis, nugget, ikan segar, kacang hijau, kacang tanah, garam, kelapa, sabun cuci, bahan celana dan baju, batik, dan lain-lain	2 Mingguan	Rabu dan Kamis dalam minggu 1 & Minggu III

Metode Pendataan 2

Jenis Daftar Isian	Jenis Komoditas	Frekwensi Pencacahan	Hari Pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)
HK-2.1	Bihun, tepung beras, daging dalam kaleng, susu wanita hamil, susu rendah lemak, susu cair kemasan, gula merah, kecap, bumbu-bumbuan, margarin, ayam goreng, biskuit, kembang gula, minuman ringan, rokok, kopi bubuk, dan lain-lain.	Bulanan	Mulai hari Selasa yang terdekat dengan tanggal 15, sampai dengan hari Kamis
HK-2.2	Pembasmi nyamuk bakar, pembasmi nyamuk cair, pembersih lantai, penyegar ruangan, baju kaos/T-shirt, celana dalam pria, celana panjang jeans, celana dalam wanita, jamu, obat-obatan, pasta gigi, dan lain-lain	Bulanan	Awal bulan tanggal 5 s/d 15

Metode Pendataan 3

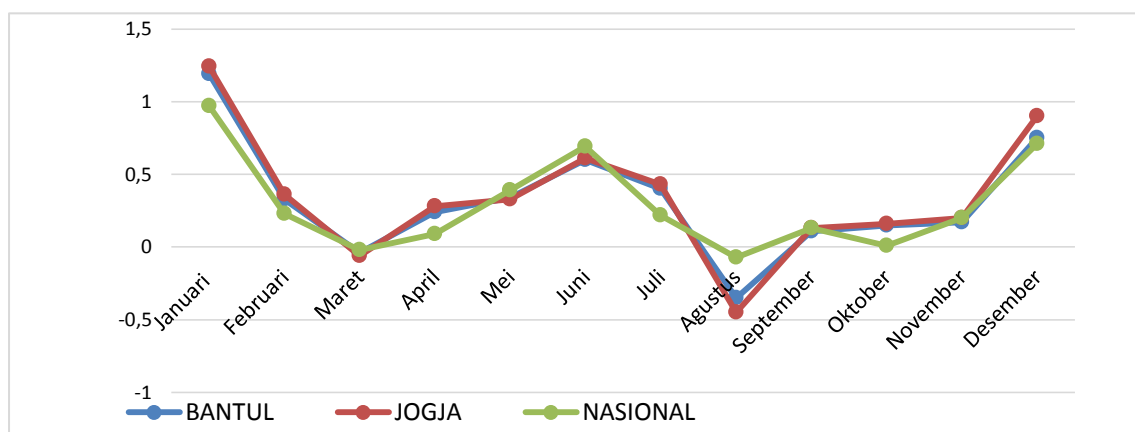
Jenis Daftar Isian	Jenis Komoditas	Frekwensi Pencacahan	Hari Pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)
HK-3	Bahan bangunan, gas elpiji, gelas, kasur, kompor gas, lemari pakaian, setrika, pompa air listrik, jam tangan, TV berwarna, bensin, mobil, sepeda motor, tarif angkutan, HP, jasa keuangan, dan lain-lain	Bulanan	Awal bulan tanggal 1 s/d 10
HKT	Digunakan juga beberapa jenis daftar isian untuk melakukan pencatatan harga, seperti jasa kesehatan,sewa rumah, dan lain-lain		

Tabel 3.10 Tingkat Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2017

Bulan	Laju Inflasi Bulanan		
	Bantul	Kota Yogyakarta	Nasional
Januari	1,19	1,24	0,97
Februari	0,33	0,36	0,23
Maret	-0,04	-0,06	-0,02
April	0,24	0,28	0,09
Mei	0,34	0,33	0,39
Juni	0,60	0,61	0,69
Juli	0,40	0,43	0,22
Agustus	-0,35	-0,45	-0,07
September	0,11	0,13	0,13
Oktober	0,15	0,16	0,01
November	0,17	0,20	0,20
Desember	0,75	0,90	0,71
INFLASI TAHUN KALENDER	3,96	4,20	3,61

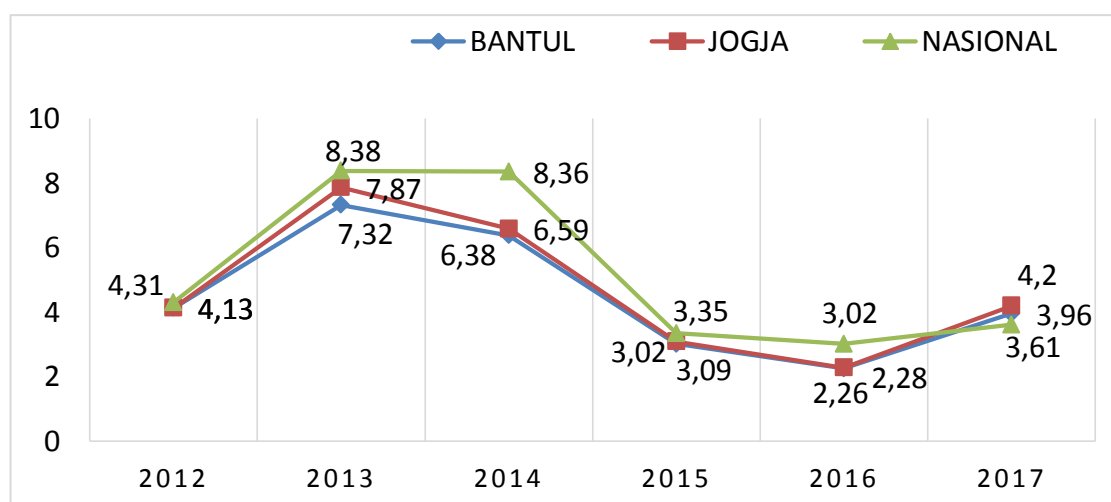
Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Tabel 3.11 Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2017



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Tabel 3.12 Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2012-2017



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.002.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.859.328.264,- (92,87%). Keluaran yang dihasilkan meliputi:

a) Pelayanan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok strategis yang meliputi komoditas pangan strategis, BBM bersubsidi, LPG, dan pupuk. Kegiatan ini berupa pelaksanaan pengawasan terhadap toko, pasar dan kios untuk memantau harga setiap hari, ijin, dan jenis dagangan. Melalui kegiatan ini diharapkan distribusi dan harga barang dapat terkendali demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang konsumsi yang membahayakan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, barang kebutuhan pokok diklasifikasikan sebagai berikut :

		
BARANG KEBUTUHAN POKOK HASIL PERTANIAN	BARANG KEBUTUHAN POKOK HASIL INDUSTRI	BARANG KEBUTUHAN POKOK HASIL PETERNAKAN
<ol style="list-style-type: none">1. Beras2. Kedelai Bahan Baku Tempe3. Cabe4. Bawang Merah	<ol style="list-style-type: none">1. Gula2. Minyak Goreng3. Tepung Terigu	<ol style="list-style-type: none">1. Daging Sapi2. Daging Ayam Ras3. Telur Ayam Ras4. Ikan Segar : Bandeng, Kembung, Tongkol/Tuna/ Cakalang.



Dalam rangka mendukung dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok strategis di Kabupaten Bantul, melalui kegiatan ini telah dilakukan kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) sebanyak 3 kali yang difasilitasi kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Pelaksanaan OPM barang kebutuhan pokok strategis telah dilaksanakan bulan 15 Mei 2017 di Desa Patalan, Jetis, bulan 6 Juni 2017 di Desa Terong, Dlingo dan bulan November 2017

di Desa Temuwuh, Dlingo. Sasaran dari pelaksanaan OPM adalah Keluarga Pra Sejahtera yang ada di wilayah tersebut. Untuk mengetahui rantai distribusi komoditas cabe dan bawang merah di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan Kajian Supply Chain Barang Kebutuhan Pokok Strategis sehingga dapat diketahui penyebaran distribusi komoditas tersebut masih dikendalikan oleh pengepul sesuai dengan musimnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok dan perlindungan konsumen dilaksanakan pengawasan terpadu bersama dengan POLRES, KODIM, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan dinas terkait lainnya yang meliputi :

1. Pengawasan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok strategis
2. Pengawasan dan pemantauan LPG 3 kg
3. Pengawasan dan pemantauan BBM (Pertamini)
4. Pengawasan dan pemantauan Bahan Berbahaya (B2)
5. Pengawasan dan pemantauan Pupuk Bersubsidi
6. Pengawasan dan pemantauan Gudang, Toko Modern dan Toko Kelontong

b) Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG)

Kegiatan pengelolaan SRG ini bertujuan untuk menstabilkan harga barang pokok pada saat harga jatuh sehingga tidak merugikan para petani di Kabupaten Bantul. Untuk mengoptimalkan operasional gudang SRG Kabupaten Bantul, pengelolaannya telah dikerjasamakan dengan KUD Tani Harjo Pandak sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 35.1.1/PK/Bt/2017 dan diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 68/PK/Bt/2017

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pengelolaan gudang SRG meliputi Sosialisasi dan pembuatan Leaflet serta memfasilitasi SRG dalam berperan serta mengikuti promosi di Pasar lelang dan Pameran. Sosialisasi

dimaksudkan untuk memfasilitasi KUD Tani Harjo sebagai pengelola dengan Gapoktan di Kabupaten Bantul agar terjalin kerjasama pemanfaatan gudang melalui sistem resi gudang. Dalam perjanjian kerjasama yang baru pengelola SRG memberikan kontribusi ke Pemerintah Daerah sebanyak 30% dari hasil bersih, dalam hal ini KUD Tani Harjo sebagai pengelola telah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.

Gudang SRG dalam pengelolaannya mengoperasikan Rice Milling Unit (RMU) sehingga bisa menimbulkan dampak polusi udara, debu maupun suara di lingkungan sekitar sehingga dibuat Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) Sebagai acuan untuk menjaga kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sekitar gudang SRG.

c) Peningkatan Pelayanan Perdagangan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dan operasional PSG (Pasar Seni Gabusan). Pada tahun 2017 terdapat 79 pedagang dengan transaksi penjualan mencapai sebesar Rp1.400.000.000,- dengan jumlah pengunjung sebanyak 282.942 orang.



Dalam rangka mendukung dan menyemarakkan pemanfaatan Pasar Seni Gabusan (PSG), Dinas Perdagangan kabupaten Bantul telah memasukkan PSG ke dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2017 sebagai pasar tradisional kelas 1 sehingga dalam setiap event di PSG dikenakan retribusi sesuai peraturan tersebut. Keberhasilan pengelolaan PSG setelah menjadi Pasar Rakyat (Agustus 2017) dapat dilihat dari perolehan retribusi pemanfaatan PSG sebesar Rp 9.191.000 (Agustus-Desember 2017)

Dalam membantu para pengrajin, khususnya yang memanfaatkan Pasar Seni gabusan, Dinas Perdagangan telah mengadakan kerjasama dengan Bank BNI Yogyakarta dalam pemasaran produk-produk dari para pengrajin melalui sistem pemasaran secara on-line yaitu dalam Bantul Kreatif Mart.

Sasaran 2.
meningkatnya kualitas pasar rakyat

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Tabel 3.13 Jumlah dan Jenis Pasar di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No.	Jenis Pasar	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pasar Desa (unit)*	29	33	33	34	34
2	Pasar Kabupaten (unit)**	31	31	32	32	33

* pasar desa dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

** pasar kabupaten dibawah naungan Dinas Perdagangan Kab. Bantul

Sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat diukur melalui indikator jumlah pasar rakyat tipe A. Kategori pasar rakyat tipe A didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/M_DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Dalam peraturan tersebut diuraikan kriteria pasar tradisional tipe A yaitu:

- a. Luas lahan minimal 3.000 m²
- b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. Peruntukan lahan sesuai dengan RTRW daerah setempat;
- d. Jumlah pedagang minimal 150 pedagang
- e. Bangunan utama berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. Ruang serbaguna untuk pembinaan pedagan, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m²
 3. Toilet/wc

4. Tempat ibadah
 5. Pos ukur ulang (minimal 2x2 m)
 6. Pos kesehatan
 7. Pos keamanan
 8. Drainase (ditutup dengan grill)
 9. Tempat penampungan sampah sementara
 10. Gedung tempat penyimpanan stok barang
 11. Area bongkar muat;
 12. Tempat parkir
 13. Area penghijauan
 14. Hidran/alat pemadam kebakaran
 15. Instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 16. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
 17. Telekomunikasi
 18. Sistem informasi harga dan stok
 19. Papan pengumuman informasi harga harian
- f. Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum
- g. Pasar dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar
- h. Operasional pasar dilakukan setiap hari
- i. CCTV yang terhubung secara online untuk memantau aktifitas perdagangan

Dari sekian banyak kriteria, untuk kriteria luas, jumlah pedagang, dan operasional pasar sebenarnya sudah dipenuhi oleh 4 pasar besar yakni pasar Imogiri, pasar Bantul, pasar Niten, dan Pasar Piyungan. Namun hanya satu pasar yang telah memenuhi semua kriteria pasar tipe A yaitu Pasar Imogiri. Dengan demikian target pasar tipe A sebanyak 1 unit pada tahun 2017 tercapai 100 persen. Diharapkan pada akhir tahun Renstra (2021) 3 pasar lainnya dapat memenuhi semua kriteria pasar tipe A sehingga pasar tipe A sebanyak 4 unit pada akhir tahun 2021 tercapai.

Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah pasar tipe A (unit)	-	1	1	100	4	25

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Pasar Imogiri pada tahun 2017 juga lolos mendapatkan sertifikat pasar ber SNI dari Badan Standarisasi Nasional. Standarisasi tersebut tertuang dalam SNI 8152:2015. Pasar Imogiri telah melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu sehingga amat layak jika Pasar Imogiri ini mendapat predikat SNI dengan nilai 100 (sempurna).



Dari seluruh pasar di Indonesia, baru 10 pasar yang sudah tersertifikasi SNI. Delapan pasar berada di DKI Jakarta, satu pasar di kawasan Depok, dan satu pasar di Temanggung.



Gambar 3.7
Kepala Dinas Kabupaten Bantul menerima sertifikat pasar ber-SNI



Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Pembayun bersilaturahmi dan bertemu dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPSI, Sandiaga Uno bertempat di GOR Ciracas pada Rabu, 24 Januari 2018. Ketua DPW APPSI DIY menyampaikan perihal kegiatan-kegiatan yang menyangkut peningkatan sarana dan prasarana di Pasar Imogiri dalam upaya dan perjuangannya menuju pasar rakyat ber-SNI dengan peraih nilai 100



Ada beberapa persyaratan sebuah pasar bisa ber-SNI. Antara lain persyaratan teknis yang meliputi ukuran luas ruang dagang, area parkir, zonasi, area bongkar muat barang, toilet, ruang menyusui, penerapan manajemen yang baik, pedagang tertata atau sistem zonasi, sistem keamanan, fasi litas tera, ramah bagi penyandang disabilitas, dan lain sebagainya.

Kabupaten Bantul patut berbangga menyusul keberhasilan Pasar Imogiri dalam mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015. Seritifikasi ini diperoleh dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN). Dengan demikian Pasar Imogiri di Bantul ini menjadi satu-satunya pasar rakyat ber-SNI di wilayah DIY.

Sertifikat SNI untuk pasar rakyat itu diberikan kepada Kepala Dinas Perdagangan Bantul pada 1 Februari 2018 di Jakarta bersamaan dengan penyerahan sertifikat SNI terhadap lima pasar rakyat lainnya yaitu pasar di Cirebon, Banyumas, Solo, Malang dan Denpasar.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat ini didukung oleh program:

1. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2. Program Pemberdayaan Pedagang
3. Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pedesaan

Program Pemberdayaan Pedagang

Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Program Pemberdayaan Pedagang

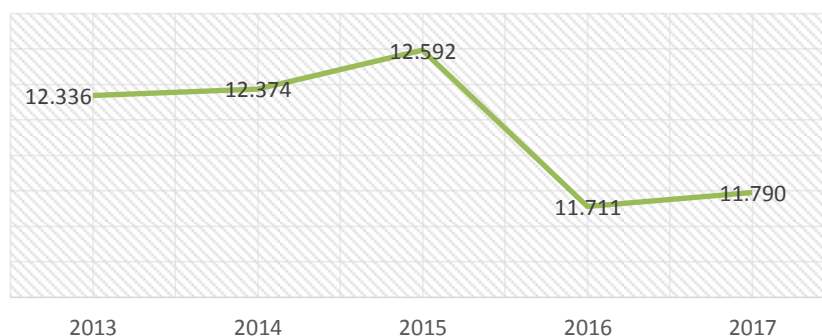
No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Pemberdayaan Pedagang	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	4.2	3,5	83,33

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Indikator program pemberdayaan pedagang ini adalah pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat. Pengambilan data dilaksanakan secara sampel kepada para pedagang di beberapa pasar. Rumus indikator program ini adalah (jumlah omzet pedagang pasar rakyat tahun 2017 – jumlah omzet pasar tahun 2016) / (jumlah omzet pedagang tahun 2016) x 100%. Dari target pertumbuhan sebesar 4,2 persen, hanya tercapai 3,5 persen, sehingga prosentase realisasi dibanding target sebesar 83,33 persen.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan, dan Promosi Pasar dengan anggaran Rp890.597.500 dengan realisasi sebesar Rp 875.195.000,- (98,27). Kegiatan ini dilaksanakan antara lain untuk penguatan kelembagaan melalui fasilitasi kepada Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul dan dimaksudkan agar organisasi ini menjadi lebih kuat dan mandiri, sehingga bisa menjadi pengayom dan perekat ikatan kekeluargaan sesama pedagang pasar, diwujudkan dalam bentuk fasilitasi, rapat koordinasi dan pendampingan organisasi demi keselarasan APPSI dan Dinas Perdagangan.

Peningkatan kemampuan pedagang pasar dalam mengelola usaha dan mengelola keuangan atas usaha yang dijalankannya dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan pedagang pasar ini dilaksanakan bekerjasama dengan pakar kewirausahaan dari perguruan tinggi (UGM), terdiri dari 18 kali pelatihan dengan peserta masing-masing 40 orang.



Gambar 3.8 Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Tahun 2013-2017

Terjadi peningkatan jumlah pedagang pada tahun 2017 menjadi 11.790 orang. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan los/kios baru pada pasar Angkruksari yang pada tahun 2016 dilakukan rehabilitasi.

Permodalan yang terbatas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat/tradisional khususnya pedagang. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya rentenir yang menjanjikan pinjaman uang dengan banyak kemudahan, namun dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan telah mengantisipasi melalui pelaksanaan pinjaman dana bergulir dengan bunga lunak tanpa agunan bagi para pedagang pasar dalam rangka penguatan modal usaha. Dana bergulir ini sudah menjangkau di 23 pasar tradisional dengan akumulasi modal sebesar Rp6.007.300.000,00 dan telah memberikan kontribusi pendapatan jasa sebesar Rp120.146.000,-. Namun demikian, pinjaman ini baru menjangkau sebanyak 3.354 pedagang (28,44%) dari seluruh pedagang pasar se-Kabupaten Bantul yang berjumlah 11.790 orang, sehingga ke depan program tersebut dapat ditingkatkan agar akses pedagang untuk mendapatkan penguatan modal lebih terbuka dan banyak untuk meningkatkan kemandirian usaha.

Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pedesaan

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Program Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	cakupan jumlah kondisi pasar baik	%	66.67	75.76	113.63

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Indikator program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur pedesaan ini adalah cakupan jumlah kondisi pasar baik. Persentase pasar baik sampai tahun 2017 sebesar 75,76 persen atau prosentase capaian terhadap target sebesar 113,63 persen.

Persentase pasar baik ini merupakan jumlah pasar dengan kondisi baik dibagi dengan jumlah pasar kabupaten (33 pasar) x 100%. dari total 33 pasar, ada 8 pasar yang belum dengan kondisi baik, yakni pasar Mangiran, Bendosari, Pundong, Turi, Gumulan, Sangkeh, Gatak, dan Barongan. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2017 di Kabupaten Bantul terdapat 25 pasar yang kondisinya sudah baik, data tersebut disajikan pada Tabel 3.17:

Tabel 3.17 Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2017 Di Kabupaten Bantul

NO.	NAMA PASAR	LUAS TANAH	KEPEMILIKAN	JUMLAH PEDAGANG
1	Bantul	27714	pemda	1,565
2	Niten	32,635	Kas Desa	926
3	Klitikan Niten	4,000	Kas Desa	167
4	Janten	1,000	pemda	79
5	Piyungan	23,500	Pemda	1,015
6	Imogiri	48,000	Kas Desa	1,587
7	Angkruksari	20,035	Kas Desa	513
8	Pijenan/Gesikan	15,000	Pemda	258
9	Hw.Pandak	1,888	SG	73
10	Pundong	6,085	Kas Desa	500
11	Jejeran	4,000	SG	711
12	Pleret	6,150	SG	421
13	Hw.Imogiri	12,000	Kas Desa	120
14	Sorobayan	20,315	Kas Desa	290
15	Semampir	2,890	SG	180
16	Sungapan	967	SG	118
17	Turi	8,050	Kas Desa	774
18	Celep	1,409	SG	121
19	Panasan	4,235	Kas Desa	231
20	Dlingo	40,000	Kas Desa	180
21	Ngipik	5,000	Pemda	167
22	Koripan	532	SG	53
23	Jragan	573	SG	47
24	Unggas Bantul	725	SG	166
25	Pasar Seni Gabusan		Kas Desa	79

Sumber Data: Dinas Perdagangan, 2017

Sasaran 3.
Meningkatnya pertumbuhan ekspor

Program ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp8.496.275.000,- terealisasi Rp8.157.855.292,- (96,02%) dalam rangka peningkatan kualitas pasar tradisional/rakyat sebagai bagian dari percepatan peningkatan perekonomian daerah. Keluaran yang dihasilkan adalah pembangunan Pasar Semampir, Pasar Hewan Pleret dan Pasar Panas.

Selain itu juga dibangun pasar Janten melalui dana DAK Tahun 2017. Pembangunan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat/tradisional di Kabupaten Bantul. Program peningkatan kualitas infrastruktur pasar tradisional yang dilaksanakan meliputi kegiatan pembangunan pasar, rehabilitasi bangunan pasar dan pendampingan penataan pasar tradisional sebagai bagian dari percepatan peningkatan perekonomian daerah.

Tantangan yang dihadapi oleh pasar tradisional adalah tumbuhnya mini market/toko modern, bertambahnya jumlah pedagang dari waktu ke waktu, dan masih banyaknya para pemilik modal swasta (rentenir) yang beroperasi di pasar.



Pasar yang direhab pada TA 2017

Indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor adalah pertumbuhan nilai ekspor. Capaian indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah sebesar 7%, realisasi sebesar 7,09%, tercapai 101,29% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 7,04% maka capaian tahun 2017 naik sebesar 0,09%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 7,25%, dengan demikian capaian tahun 2017 ini telah menyumbang 97,79% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tabel 3.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan nilai ekspor	7,04	7	7,09	101,29	7,25	97,79

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Peningkatan ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti sarung tangan, tekstil, furniture, dan handycraft, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura. Perkembangan ekspor Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.9. Perkembangan Ekspor 2014-2017

Salah satu kegiatan perdagangan di Kabupaten Bantul adalah dengan mengembangkan pemasaran dengan promosi produk melalui pameran yang berlangsung setiap tahun, sehingga mampu mendukung pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Ekspor Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Volume ekspor	6.564.208,33	7.299.669,06	7.689.301,62	7.871.678,60	9.642.793,22	10.168.084,06
2	Nilai ekspor (US\$)	44.582.627,05	56.644.456,97	59.771.562,69	66.626.177,34	73.971.386,12	79.200.365,60
3	Jumlah Negara	30	42	43	43	42	44
4	Macam komoditi	26	36	35	36	36	25

Sumber: Dinas Perdagangan, 2012-2017, diolah

Berdasarkan tabel dan gambar perkembangan ekspor Kabupaten Bantul pada tahun 2012-2017 terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 nilai ekspor sebanyak 79.200.365,60 US\$, jumlah komoditi yang diekspor sebanyak 25 komoditi, jumlah eksportir sekitar 37 eksportir, serta terdapat 44 negara tujuan ekspor.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat ini didukung oleh program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dan Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah nilai ekspor	US \$	74,000,000	79,200,365.6	107.03

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor produk UKM Kabupaten Bantul dengan cara memberikan fasilitasi pameran produk dan peningkatan SDM melalui pelatihan. Dilaksanakan dengan dana sebesar 1.461.363.000,-, dan realisasi sebesar Rp 1.406.401.550,- (96,24%). Adapun kegiatan dari program ini hanya satu yakni kegiatan Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah.

Salah satu cara untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM dan meningkatkan pendapatan melalui ekspor adalah memberikan bekal pelatihan kepada UMKM yang berpotensi untuk melakukan ekspor. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pelatihan pemasaran dan distribusi terhadap 30 pengusaha/perajin, pelatihan pemasaran online dengan 30 peserta yang berpotensi ekspor, serta pelatihan manajemen perdagangan luar negeri sebanyak 40 orang yang dilanjutkan dengan melakukan studi komparasi ke PT Terminal Peti Kemas di Surabaya.

Selain pelatihan, kegiatan ini juga memperkenalkan hasil-hasil produk unggulan Kabupaten Bantul melalui berbagai pameran yang berskala nasional. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk mempertemukan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bantul dengan para pembeli (*buyer*) yang ada di manca negara. Dari kegiatan ini diharapkan akan banyak pelaku usaha dari Kabupaten Bantul yang melakukan ekspor dan dapat meningkatkan penjualan secara berkelanjutan dengan buyer dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kegiatan ini telah terlaksana enam pameran di dalam negeri meliputi:

- (1) Pameran Furniture Jakarta;
- (2) Pameran Adiwastra Nusantara Jakarta;
- (3) Pameran TEI Jakarta;
- (4) Pameran Jakarta Fair;
- (5) Pameran Batam;
- (6) Pameran Lombok;
- (7) Pameran Medan

3.3 Akuntabilitas Anggaran



Dari kemampuan keuangan daerah, maka jumlah pendanaan yang untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp24.814.281.880,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp19.625.360.516,00 atau sebesar 79,09%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 20 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4.156.520.000	16,75
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	9.579.282.500	38,60
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	1.532.763.000	6,18
Jumlah		15.268.565.500	61,53
Belanja Langsung Pendukung		9.545.716.380	38,47
Total Belanja Langsung		24.814.281.880	100

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp15.268.565.500,00 atau sebesar 61,53% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp9.545.716.380,00 atau sebesar 38,47% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat dengan besaran anggaran 38,60% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor sebesar 6,18% dari total anggaran belanja langsung.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus rasio efektifitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0 – 40%)
- (2) Tidak efektif (40% - 60%)
- (3) Cukup efektif (60% - 80%)
- (4) Efektif (80% - 100%)
- (5) Sangat efektif (> 100%)

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 79,09% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori **cukup efektif**. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 92,5% (kategori efektif), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 57,62% (kategori tidak efektif).

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU pertumbuhan nilai ekspor A sebesar 96,41%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 85,60%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.21 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,61	6,73	100	4.156.520.000	3.558.013.904	85,60
2	Jumlah pasar tipe A	1	1	100	9.579.282.500	9.088.899.292	94,88
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor	7	7,09	101,29	1.532.763.000	1.477.701.550	96,41

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

3.4 Efisiensi Sumber Daya



Tabel 3.22 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa	%
1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.156.520.000	3.558.013.904	598.506.096	14,40
2	Jumlah pasar rakyat tipe A	9.579.282.500	9.088.899.292	490.383.208	5,12
3	Pertumbuhan ekspor	1.532.763.000	1.477.701.550	55.061.450	3,59
Jumlah		1.532.763.000	1.477.701.550	1.143.950.754	4,61
Belanja Langsung Pendukung		9.545.716.380	5.500.745.770	4.356.795.016	45,64
Total Belanja langsung		24.814.281.880	19.625.360.516	5.188.921.364	79,09

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>=100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	145.99	85.60	14.40
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	100	94.88	5.12
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	101.29	96.41	3.59

Dari 2 tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi yang melebihi 10% adalah pada sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan di belanja pendukung. Hal ini sudah tidak bisa disebut dengan efisiensi karena dengan realisasi anggaran sebesar 79,09% berarti ada Rp5.188.921.364,00 yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2017 dan menjadi Silpa Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Silpa tersebut sebagian besar disebabkan oleh tidak terlaksananya beberapa sub kegiatan yakni:

- 1) Kegiatan Pelayanan Kemetrolagian Daerah (*dalam belanja utama*)

Dengan anggaran Rp 2.029.845.000,00, direalisasikan sebesar Rp1.578.454.040,00 (77,76%). Permasalahan pada pengadaan peralatan kemetrolgian. Proses lelang telah selesai dilaksanakan dan pihak penyedia sebagai pemenang lelang telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan dokumen kontrak telah disepakati. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak penyedia tidak bisa menyediakan barang sesuai dengan kontrak.

2) Kegiatan Pengadaan Tanah Dari Tanah Kas Desa (*dalam belanja pendukung*)

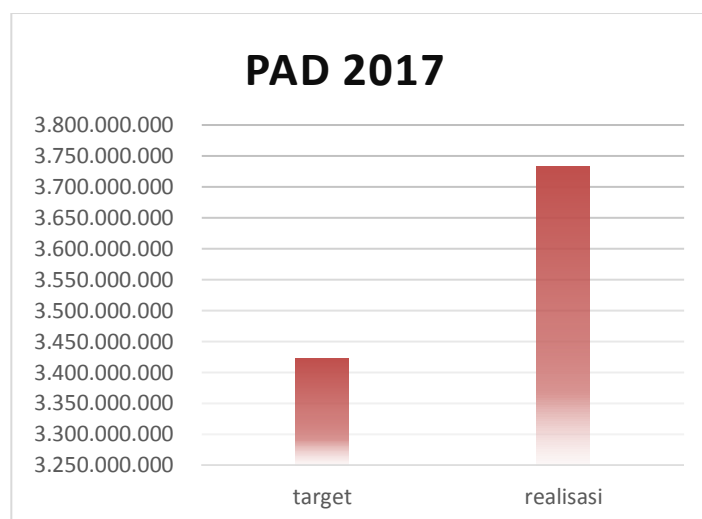
Dengan anggaran sebesar Rp3.994.450.000, hanya bisa direalisasikan sebesar Rp101,636,000 (2.544%). Realisasi tersebut hanya untuk membiayai appraisal tanah, sedangkan penggantian/pembelian tanah kas desa tidak dapat dilaksanakan. Pengadaan tanah kas desa terdiri dari 2 lokasi yakni pasar Niten dan pasar Sorobayan. Sampai dengan Oktober 2017 hanya pasar Niten yang bisa mengumpulkan berkas untuk pembebasan lahan tanah kas desa untuk pasar Niten. Kemudian Surat Ijin Gubernur DIY tentang pelepasan tanah kas desa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 belum terbit, sehingga proses penggantian TKD tersebut tidak bisa direalisasikan.

3.5 Kinerja Lain-lain



3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perdagangan mempunyai unit ekonomi yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul yaitu dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, MCK pasar, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari target PAD sebesar Rp 3.423.000.000,00 mampu tercapai sebesar Rp 3.732.640.519 atau terealisasi sebesar 100,05%. PAD terbesar bersumber dari retribusi pelayanan pasar berupa sewa kios/los.



Gambar 3.10 Target dan Realisasi PAD Tahun 2017

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2017

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	2,146,458,890	2,225,133,700	103.67%
2012	2.163.415.600	2.410.211.080	111,41%
2013	2.356.818.400	2,679,007,411	113.67%
2014	2.359.176.900	2.806.066.775	118,94%
2015	3.380.549.050	3.690.777.725	109,18%
2016	2.700.000.000	2.893.491.150	107.17%
2017	3.423.000.000	3.732.640.519	109,05%

3.3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

Tabel 3.24 Nilai rata-rata unsur pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Prosedur pelayanan	3.518
U2	Persyaratan pelayanan	3.510
U3	Kejelasan petugas pelayanan	3.451
U4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3.312
U5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3.158
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3.628
U7	Kecepatan pelayanan	2.996
U8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3.067
U9	Kesopanan dan keramahan petugas	3.668
U10	informarsi ketentuan biaya/atau tanpa biaya	2.980
U11	informarsi ketentuan biaya/atau tanpa biaya	2.980
U12	ketepatan pelaksanaan	3.553
U13	kenyamanan	3.008
U14	keamanan	3.103

Dari Tabel 6 di atas, terlihat bahwa keima unsur dengan nilai tertinggi adalah :

- a. Kesopanan dan keramahan petugas
- b. Kemampuan petugas melayani
- c. ketepatan pelaksanaan
- d. Prosedur pelayanan
- e. Persyaratan pelayanan

Hal tersebut memperlihatkan bahwa dari sisi petugas atau karyawan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sudah memiliki kemampuan, kesopanan dan keramahan yang bagus meski harus tetap dipertahankan. Keramahan dan kesopanan petugas sangat berdampak pada kepuasan pengguna layanan pada Dinas Perdagangan. Semakin tinggi nilai indeks unsur ini, semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Perdagangan.

Unsur pelayanan dengan nilai terendah adalah pada unsur informarsi ketentuan biaya/atau tanpa biaya. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk informasi ketentuan biaya pelayanan belum tersosialisasi dengan baik.

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Perdagangan I Tahun 2017 adalah **81,53**.

Tabel 3.25 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 81,53 dan melihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul kategori “**SANGAT BAIK**”.

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

3.3.3 E-Government

Dalam rangka penggunaan teknologi informasi, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah ikut memanfaatkan aplikasi *e-government* yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, baik yang bersifat intranet, desktop maupun online, seperti terlihat pada Tabel 26.

Tabel 3.26. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas Perdagangan Tahun 2017

No.	Sistem Informasi
1	Penerapan SIM Keuangan Daerah (SIMDAKEU) untuk RKA, DPA, Laporan Keuangan, dan Pendapatan
2	Penerapan SIM Perencanaan Pembangunan untuk usulan program/kegiatan
3	Pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui http://lpse.bantulkab.go.id)
4	Berita yang diupdate oleh admin sub domain melalui www.bantulkab.go.id
5	Persuratan dengan sistem online
6	e-sakip untuk sinkronisasi antara perencanaan dan lakip
7	SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan untuk perencanaan pengadaan barang dan jasa
8	www.bantulkreatifmart.com sebagai sarana penjualan online di Kabupaten Bantul



Gambar 3.11 Dokumentasi Berbagai Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2017



Peringatan Hari Cuci Tangan Hari Cuci Tangan Sedunia Di Pasar Imogiri



Pelatihan Kepada Pedagang di Pasar Barongan



Pemantauan Di Pasar Bantul



Dinas Perdagangan Kab. Bantul melakukan cross Check langsung Dana Bergulir di Pasar Piyungan



Pelatihan Pemasaran dan Distribusi Produk UMKM serta Eplatihan Kemasan Produk Tahun 2017

Siaran Langsung Dinas
Perdagangan, Pengelola Pasar
mogiri dan RRI Yogyakarta.



Kerja Bakti di Pasar Pasar Pijenan
bersama Pejabat Pemerintahan
Kabupaten Bantul



Komisi B DPRD Kab. Bantul
mengadakan kunjungan ke Pasar
Semampir yang saat ini baru
proses pembangunan gedung
pasar yang baru



Event Senam Sehat dan Lomba
lukis tingkat TK, SD, SMP dan
SMA se Jogjakarta di Pasar Seni
Gabusan



Pembukaan Bantul Ekspo 2017



Bapak Bupati Bantul meloanching
Operational Rice Millingunit (RMU)
dan Produksi Beras Bantul melalui
Mekanisme Skema Sistem Resi
Gudang (SRG) Makaryo Mbangun
Deso, yang di Laksanakan di
Gudang RSG Niten



pertemuan dengan APPSI Pasar
Sungapan



www.bantulkreatifmart.com ini
adalah Kerjasama dari
Pemerintahan Kab. Bantul dan BNI
46 yang memfasilitasi web sebagai
sarana penjualan online di kab.
Bantul

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar **115,76%** atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan harapan. Sebaliknya dengan terdapatnya anggaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, diakui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

4.2 *The Next Steps*

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan

upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Berikut permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan pencapaian target indikator kinerja:

Tabel 4.1 Permasalahan dan Solusi

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok	Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga perlu dilakukan pemantauan secara kontinyu dan ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar
2	pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal	Pemantauan kualitas barang beredar dilakukan melalui pengujian mutu secara berkelanjutan dan diperlukan penegakan hukum secara terpadu
3	Distribusi barang komoditas bahan pokok masih cukup panjang untuk bisa sampai pada tingkat pedagang pasar, sehingga berdampak terhadap harga produk yang mahal ditingkat konsumen.	Memutus jalur distribusi barang agar lebih cepat dan efisien
4	Kebutuhan akses pasar atas produk UMKM masih luas namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal	Pemanfaatan teknologi informasi, promosi, peningkatan nilai tambah, kualitas dan diversifikasi produk sebagai upaya peningkatan kapasitas jaringan pemasaran bagi UMKM agar dapat diterima oleh pasar mancanegara dan pasar dalam negeri
5	Daya saing produk yang semakin tinggi dengan berlakunya MEA	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan promosi yang lebih intensif. - Peningkatan daya saing.
6	Mindset / pola pikir dan perilaku pedagang pasar baik dalam hal manajemen, layanan dan kebersihan lingkungan pasar yang belum maju	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Manajemen Pasar - Meningkatkan kapasitas pelayanan kebersihan dengan menambah armada truck sampah.
7	Masih ada rentenir yang beroperasi di pasar rakyat/tradisional sehingga mengurangi tingkat laba usaha pedagang.	Memperluas jangkauan/distribusi pengelolaan dana bergulir serta menambah modal, agar semakin maksimal pedagang yang terlayani.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERDAGANGAN

Kompleks II Perkantoran Pemkab Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul,
D I Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon (0274)367338 Faks (0274)367504
Email: dinas.perdagangan@bantulkab.go.id
website: perdagangan.bantulkab.go.id